



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 2 No. 2 2022; (page 213-225)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/as-Shahifah>

Peran Kiai dalam Kontestasi Politik Lokal di Madura

Jihan Amalia Syahidah

Madura Institut Agama Islam Negeri Madura

Jl. Raya Panglegur KM 04 Pamekasan

Email: jasyahidah@iainmadura.ac.id

Abstract

Madura yang merupakan salah satu pulau yang dikenal kental dengan nilai-nilai islami memberikan warna tersendiri dalam kehidupan masyarakatnya. Pesantren yang menjamur di Pulau Madura baik dari Kabupaten Bangkalan sampai Kabupaten Sumenep yang tentu tidak dapat dihitungkan jumlahnya seolah menandakan bahwa Pulau Madura sejatinya merupakan Pulau yang bercorak kultur islami. Dalam corak tradisi dan kultur dari masyarakat Madura Kiai memiliki peran yang besar dalam setiap proses penentuan sikap dan juga perilaku social dalam masyarakat. Dalam masyarakat Madura Kiai atau *keab* merupakan orang yang terhormat dan disegani oleh masyarakat setempat karna setiap tutur kata, sikap, perbuatan serta perilakunya menjadi sebuah contoh bagi masyarakat. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana peran kiai dalam poros politik local di Madura yang dalam hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena sosok Kiai mulai dilirik untuk memberikan konsultasi bagi berbagai partai politik maupun orang-orang yang ingin masuk ke dalam dunia politik dan bertarung dalam kontestasi pemilu ditingkat lokal. Mereka yang akan maju dalam pemilihan umum terlebih dahulu “sowan” dan meminta restu dari para Kiai serta memohon dukungan agar dapat dengan mulus melaju dalam proses kontestasi pemilihan umum. Permasalahannya yang muncul adalah bagaimana kemudian para Kiai dapat memosisikan diri mereka dalam menjalankan perannya sebagai kiai yang memiliki bekal pengetahuan agama yang luas ketika dihadapkan pada dinamika politik local di Madura.

Kata kunci: Kiai, Kontestasi, Madura, Politik Lokal,

Author correspondence email: email_penulisi@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2022 by as-Shahifah. All Right Reserved

Pendahuluan

Kontestasi politik merupakan hal yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, pelaksanaan kontestasi politik yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menandakan adanya keberhasilan dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan melalui pemilihan umum dalam rangka memilih pemimpin-pemimpin pusat maupun daerah. Dalam melaksanakan pemilihan umum elit politik bersaing secara terbuka dan fair untuk mendapatkan kekuasaan dari hasil perolehan suara. Para elit yang bersaing tersebut memenikan suatu permainan politik sehingga pola hubungan antara rakyat dan para elit politik diteguhkan melalui mekanisme pemilihan umum yang jujur dan terbuka.¹

Sebagai suatu arena kontestasi politik yang digunakan untuk memilih wakil rakyat dengan jumlah kursi yang terbatas, partai politik atau perseorangan yang merupakan peserta dari pemilihan umum akan melakukan segala strategi untuk mendulang suara.. Salah satunya adalah dengan melakukan berbagai agenda politik untuk menjalin sebuah hubungan dengan berbagai sector yang dapat mendukung para calon untuk memperoleh banyak suara. Hal ini dilakukan karena banyaknya persaingan yang kemudian terjadi pada saat proses pemilihan umum dimana partai politik maupun calon perseorangan mencoba untuk menebar simpati dan janji kepada rakyat sehingga tertarik untuk memberikan suaranya karena ketatnya kompetisi dalam proses pemilihan umum.

Di Madura, kontestasi politik menjadi hal yang menarik untuk ditelaah terutama dalam kaitannya dengan peran sosok kiai yang dianggap memiliki kharisma dengan sikap kesopanan dan kewibawaannya menjadikannya banyak disegani oleh masyarakat dan kemudian dipercaya dalam memberikan masukan, kritik dan saran baik dari segi keluarga, ekonomi, budaya dan juga dalam hal politik. Kiai dianggap dapat

¹“Dari Langit: Kumpulan Esai tentang Manusia, Masyarakat, dan Kekuasaan”, <http://books.google.co.id/books?isbn=9799101425> (diakses pada 10 Desember 2022).

menangkap peluang-peluang politik dengan berpartisipasi secara lebih intensif dengan menggunakan otoritas keagamaannya untuk memberikan pengaruh di masyarakat termasuk dalam proses pemilihan umum.

Masyarakat Madura masih menjunjung tinggi paradigma kepatuhan masyarakat terhadap *Bhapa' Bhabu' Guruh Ratoh* (Orangtua, Guru Kiai dan Pemimpin Pemerintahan) yang menjadikan sosok guru kiai sebagai sosok orang yang disegai dan memberikan banyak pengaruh di masyarakat menjadikan kiai memiliki *previlage* dalam kehidupan masyarakat di Madura. Ketika kemudian masyarakat mempercayai pilihan politik kiai dianggap sebagai pilihan yang terbaik secara sadar atau tidak kemudian akan membentuk kultur politik masyarakat Madura dengan membawa kekuatan karisma keagamaannya dalam menghimpun suara dalam kontestasi politik lokal di Madura.

Metode

Tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang berusaha untuk memahami makna suatu peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang tertentu dalam situasi tertentu secara holistic dalam realitas social empirik.² Sumber data diperoleh dari sumber data primer yakni dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literature kepustakaan baik berupa buku, catatan maupun laporan penelitian dari penelitian terdahulu.

Hasil dan Pembahasan

Fenomena politik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia pasca tumbangannya rezim Soeharto adalah dengan bangkitnya elit ekonomi yang berbondong-bondong untuk berpartisipasi dalam dunia politik dengan mencalonkan diri untuk dapat menduduki jabatan-jabatan penting di suatu daerah mengingat pada saat pimpinan Soeharto masyarakat tidak dapat mengekspresikan naluri berpolitik karna beberapa kebijakan Soeharto pada saat itu yang memberikan batasan kepada masyarakat

² Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta:Metodologi Penelitian Kualitati, 1998), hlm 16.

untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam beberapa aspek kehidupan bernegara.

Dalam kepatuhan masyarakat yang ada di Madura yang bertahan hingga saat ini yakni keberadaan Wali atau Kiai sehingga posisi ini yang menjadi pengayom utama dan pertama yang dipercayai oleh sebagian besar Masyarakat Madura.³ Dalam hal ini kiai dianggap sebagai seorang pemimpin, ulama, guru dan juga pemilik pondok pesantren yang memiliki peran besar dalam tatanan kehidupan masyarakat. Awal mula terjadinya dinamika politik yang melibatkan para kiai ini terjadi dengan adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap sosok kiai yang diminta untuk memberikan berbagai saran dan masukan terhadap pilihan politik masyarakat di sekitar pondok pesantren yang dipimpinnya. Masyarakat percaya betul bahwa titah kiai termasuk dalam urusan menjatuhkan pilihan politiknya dalam suatu pemilihan umum. Partai politik di Madura yang mengetahui pentingnya sosok kiai untuk memberikan berbagai “keuntungan” akhirnya berbondong-bondong untuk sowan ke para kiai dengan dalih meminta restu untuk maju kedalam kontestasi pemilihan umum. Baik partai politik maupun perseorangan tersebut berusaha mengambil hati dari para kiai untuk dapat dipercaya oleh kiai sehingga jalan mereka menuju kontestasi pemilihan umum lebih mulus dan mudah karna ada sosok kiai yang menjadi “garda” mereka sehingga akan menarik minat dari masyarakat dengan harapan kiai tersebut dapat mempengaruhi suara masyarakat dan akan menjadi kemenangan bagi calon partai politik atau perseorangan tersebut.

Secara spesifik di Madura, terdapat beberapa tipologi elite lokal, seperti, blater, kiai, Klébut (kepala desa), Aria/Sentana (bangsawan), Birokrat, Politisi lokal, cendekiawan, oréng sogi, tauke, juragan, dan

³ Ahmad Mukri Aji et al., 2020: 732 = Ahmad Mukri Aji, Harisah, & Syarifah Gustiawati Mukri. (2020). Position of Kiai in Traditions and Ideologies of Traditional Waqf in Maduranese Communities. *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29, No. 7s.

bandol.⁴ Para elit tersebut memiliki peran social yang berbeda-beda di masyarakat bahkan diantara elit tersebut ada yang memiliki pengaruh besar dalam tegaknya demokrasi di tingkat local Madura. Modal yang dimiliki para elit tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk menggerakkan massa dalam pemilihan umum di tingkat lokal. Misalkan pada elit juragan dapat mempengaruhi masyarakat dengan modal dari segi ekonominya, cendikiawan dengan ilmu nya serta kiai dengan ilmu agamanya yang dianggap lebih baik dibandingkan dari kalangan masyarakat biasa. *Previlage* yang dimiliki oleh para elit lokal ini menjadikan mereka dapat memberikan pengaruh besar dalam kehidupan social masyarakat dan membuat para elit tersebut mmempunyai basis massa dalam masyaraat akar rumput (*grassroots*).

Mengaca pada saat kepemimpinan Soeharto dimana kebebasan politik hamper tidak ada dan sudah demikian rupa di tentukan oleh pusat sehingga masyarakat tidak dapat berkutik dalam menentukan pilihannya yang megakibatkan bungkamnya nilai demokrasi di Indonesia yang ditandai dengan kekuatan para elit ini dalam mempengaruhi dinamika politik di Indonesia tak terkecuali di Madura. Para kiai mampu mengendalikan seluruh lapisan masyarakat baik dari santri, wali santri serta masyarakat sekitarnya untuk memberikan suara yang sama dalam proses pemilihan umum. Hal ini bukannya tanpa alasan, para kiai mempengaruhi dinamika politik di Madura berusaha untuk membenagun kembali tatanan kehidupan yang pada saat itu sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja sehingga perlu adanya usaha untuk membangun stabilitas perpolitikan di Indonesia agar lebih stabil dan dinamis. HUBungan antara kiai denan masyarakat diperkuat dengan emosi keagamaan yang dibawa oleh sang kiai sehingga menjadikan kiai memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan social dan merupakan tokoh pemersatu bagi masyarakat di Madura.

Menurut Imam Suprayogo yang menjelaskan beberapa alasan kiai terlibat dalam dinamika politik yang pertama adalah berdasarkkan adanya suatu keyakinan yang bersumber dari ajaran agama islam bahwa nilai

⁴ Wiyata, Latief, Carok:Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm 34.

dakwah dan perjuangan dari seorang kiai bukan hanya pada aspek spiritual semata namun juga pada nilai-nilai kehidupan lainnya. Kedua, secara historis keterlibatan kiai dalam politik terlihat sejak masa pra kemerdekaan yaitu ikut terlibat dalam usaha Indonesia dalam menuju kemerdekaan yakni dengan cara mengusir colonial Belanda baik secara diplomasi maupun dengan perang gerilya dan menjadikan pesantren sebagai tempat untuk menyusun strategi dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Ketiga sebagai tokoh/elit agama, kiai bisa memobilisasi massa dan mempunyai pengaruh yang besar di masyarakat, kiai dipercaya sebagai decision making atau pengambil keputusan bersama dengan tokoh politik lainnya yang berusaha untuk memecahkan persoalan-persoalan social yang ada di masyarakat.⁵

Pada pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1999 terdapat sedikit pergeseran perilaku masyarakat di Madura dimana pada saat itu masyarakat mulai memberanikan diri untuk menentukan pilihan yang berbeda dengan sang kiai yang selama ini menjadi panutannya. Hal ini tentu menjadikan peran kiai mulai bergeser karna adanya perubahan dalam pengambilan keputusan dari masyarakat yang berbeda dari kiai nya, peristiwa ini kemudian terus-menerus mengalami suatu perkembangan yang menandakan pesta demokrasi di Indonesia dapat mulai diterapkan dengan prinsip luberjurdil (langsung, bebas, jujur dan adil) terutama ketika diimplementasikannya otonomi daerah yang menjadikan masyarakat dapat memilih langsung pemimpin yang akan memimpin daerahnya.

Dalam teori struktur sosial menurut Evans Pritchard yang dikutip dalam buku Kaplan dan Manner menyatakan suatu bentuk relasi tetap yang menyatukan kelompok-kelompok pada satu kesatuan yang luas yang dipengaruhi oleh suatu individu yang berpengaruh dalam kelompok tersebut.⁶ Hal inilah yang kemudian menjadikan sosok kiai di Madura

⁵ Imam Suprayogo, *Kiai Politik, Kiai Advokatif dan Kiai Spiritual* (Surabaya: Universitas Airlangga, 1998), 62.

⁶ Kaplan dan Manner, *Teori Budaya* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2000), 139

menjadi sangat penting kaitannya dalam memberikan pengaruh kepada individu-individu yang ada di dalam lingkungan masyarakat sekitarnya. Dalam kaitannya dengan hal ini partai politik ataupun perseorangan yang ingin masuk dalam kontestasi pemilihan umum kemudian melihat adanya peluang untuk meminang para kiai dalam menghimpun suara untuk kepentingan mereka. Pandangan dari partai politik dan perseorangan tersebut adalah bahwasanya para kiai di Madura dianggap memiliki kekuatan untuk menghimpun masa yang banyak dari berbagai kalangan baik kalangan atas hingga masyarakat akar rumput sehingga dapat memberikan keuntungan bagi parpol tersebut. Terkait hal ini modal yang dimiliki oleh para kiai dianggap sudah “mumpuni” dalam dunia politik dengan berbekal pada otoritas keagamaan yang dimilikinya. Otoritas menurut Max Weber dimulai dengan adanya dominasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan probabilitas bahwa semua perintah yang ada akan dipatuhi oleh sekelompok orang lain, tentu orang yang dapat memerintah dan mempengaruhi adalah orang yang telah dipercaya dalam hal ini adalah sosok kiai.⁷

Ada dua faktor yang kemudian menjadikan kuatnya posisi kiai di dalam masyarakat yang pertama adalah bahwa kiai memiliki pengetahuan yang dianggap luas dimana penduduk atau masyarakat sekitar mempercayai perannya terutama dalam hal keagamaan dan yang kedua adalah kiai berasal dari keluarga yang terhormat dan berkecukupan.⁸ Kiprah kiai dalam dunia politik dibutuhkan oleh pasangan calon yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum di tingkat lokal. Para kiai bahkan tak jarang diajak untuk melakukan kampanye dengan tujuan menarik simpati para pendukung pasangan calon atau partai politik tertentu.

Setelah kiranya peran sentral kiai dalam mempengaruhi masyarakat dalam pilihan politik menjadi hal yang lumrah yang terjadi kemudian adalah adanya pergeseran yang amat fundamental terkait dengan peran para kiai di Madura. Dahulu partai politik yang ada sibuk

⁷ George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Moderen*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2018), 202.

⁸ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* (Yogyakarta:LKiS, 2004), 96.

untuk meminta restu dan sowan kepada para kiai untuk menghimpun suara dan mendapatkan dukungan dari para kiai di Madura untuk mensukseskan kontestasi politik di Madura namun beberapa tahun terakhir ini justru partai politik melirik kiai untuk dijadikan sebagai calon yang akan mewakili partai mereka. Para kiai mengukuhkan kulturalnya dengan mencoba keberuntungan untuk merambah kedalam kekuasaan structural pada pemilihan umum lokal di Madura dengan berbekal kharisma dan ilmu keagamaan yang dimilikinya. Transformasi kepemimpinan kiai ini menjadikan para kiai mulai ikut bermain dalam kisaran dunia politik yang kemudian terjadi pergeseran dimana para kiai tidak hanya sebagai sosok sentral dalam hal keagamaan tetapi juga sebagai orang yang menduduki jabatan structural dalam suatu pemerintahan lokal. Banyak kiai yang menjadi pejabat public ataupun pemimpin daerah baik Bupati atau Walikota.

Ketaatan dari masyarakat terhadap sosok kiai dinilai sebagai suatu modal sosial (*social capital*) bagi para kiai untuk ikut serta dalam kontestasi politik lokal di Madura. Salah satu kiai yang mencoba keberuntungan di dunia politik adalah kiai alm. Fuad Amin Imron yang kemudian terpilih selama dua periode yakni 2003-2008 dan 2008-2013 untuk menjadi Bupati Bangkalan yang kemudian diteruskan oleh anaknya Ra Momon. Namun dalam perjalanannya kiai Fuad Amin Imron ketika menjadi Bupati Bangkalan ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Kabupaten Bangkalan tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan selama masa pemerintahan yang dipegang oleh Fuad Amin. APBD Bangkalan masih tergantung pada subsidi yang diberikan oleh Negara. Kejanggalaan kontrak jual beli gas antara Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore, Pertamina EP dengan Media Energi menjadi asal mula Fuad Amin tersandung dalam kasus korupsi selain itu Fuad Amin disinyalir melakukan penyelewengan terhadap APBD Kabupaten Bangkalan sebesar 414 milyar dan jualbeli jabatan untuk Kuasa Pegawai Negeri Sipil mulai dari 15 juta hingga 50 juta dan juga Fuad Amin diduha meminta upeti kepada para pengusaha migas yang ada di Kabupaten Bangkalan

sebesar 200 juta hingga 1 miliar.⁹ Atas dasar inilah kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan Bupati Bangkalan tersebut sebagai tersangka.

Kasus tersebut merupakan salah satu contoh kasus yang kemudian menjadikan kiai sebagai pejabat publik di daerah yang mengikuti kontestasi pemilihan umum namun tidak jarang tersandung kasus hukum. Relasi antara kiai dengan dunia politik terkadang menjadikan sosok kiai yang notabennya sebagai sosok yang memiliki peran menyebarkan nilai keagamaan pada masyarakat namun nyatanya justru banyak yang kemudian lalai akan jabatannya sehingga mengakibatkan adanya penyelewengan dana atau anggaran daerah. Dalam hal ini kiai yang menduduki jabatan structural di suatu daerah seharusnya masih bisa memfilter dengan menempatkan nilai agamisnya untuk mencapai suatu kekuasaan yang ingin dimilikinya namun yang terjadi munculnya beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Bangkalan pada saat Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2004 dan tahun 2009 menjadi bukti empiric bahwa elite kiai menjadi elit yang paling di patuhi oleh masyarakat baik pada saat memberikan masukan terhadap pilihan politik maupun pada saat para kiai mencalonkan diri sebagai seorang pasangan calon suatu partai politik. Hal ini kemudian diperkuat dengan pendapat dari Geertz yang meyakini bahwa sejak dahulu kiai memiliki peran sebagai perantara kekuasaan dengan berbagai symbol agama yang dimilikinya.

Di Madura baik dari kabupaten Bangkalan hingga Kabupaten Sumenep, jumlah kiai yang mencalonkan diri sebagai pejabat daerah sudah banyak jumlahnya. Hal ini seolah mengukuhkan posisi kiai sebagai seseorang yang memiliki pengaruh besar. Namun yang menjadi permasalahan adalah munculnya politik identitas kiai yang ada di Madura. Meskipun tidak selalu dipahami sebagai suatu konotasi yang negative namun politik identitas ini harus dipahami dengan benar dan menyeluruh. Di Indonesia politik identitas ini sering di kategorikan dalam dua hal yakni didasarkan pada aspek nasionalis maupun agamis. Oleh karena itu

⁹ Andi S. Bupati Fuad Amin, Koruptor Rp.414 Miliar yang Bikin Geger LP. Retrieved December 16, 2019, from detik.com website <https://news.detik.com/berita/d-4127094/bupati-fuad-amin-koruptor-rp-414-miliar-yangbikin-geger-lp>

perlunya peran dari kiai dalam menyeimbangkan aspek nasionalis dan agamis ketika mereka memutuskan untuk menjadi pejabat public karena apabila tidak dikelola dengan bijak maka akan menjadi ancaman bagi stabilitas dan kesatuan baik pada pemerintahan dalam tingkatan lokal maupun nasional. Apabila dari aspek agamis maupun nasionalis saling bertentangan maka akan berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat dan akan memecah belah kerukunan yang ada di dalam masyarakat.

Strategi mobilisasi massa yang digunakan melalui jejaring kekuasaan kiai merupakan modal politik yang besar dan akan menentukan kemana dukungan masyarakat akan diarahkan sebab peran kiai yang sangat besar sehingga seolah dapat memandu masyarakat untuk memilih kiai tersebut sebagai pasangan calon di wilayah lokal Madura.

Fakta yang terjadi pada pemilihan lokal yang ada di Madura adalah bahwa masyarakat Madura semakin sadar akan kebebasan pendapat untuk menentukan pilihannya masing-masing sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pendapat kiai dan para elit lokal yang ada di daerahnya. Mereka bebas untuk berpendapat dan memilih pemimpin yang terbaik menurut versinya tentu dengan harapan adanya perubahan yang lebih baik dengan adanya kontestasi pemilihan umum di tingkat lokal sesuai dengan tujuan otonomi daerah bahwa daerah berhak untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka menciptakan kemakmuran masyarakat di daerah tersebut.

Sisi lain mengatakan bahwa para kiai yang mencoba keberuntungannya di dalam kontestasi pemilihan umum tidak serta merta dapat lolos dari hukuman ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Nyatanya kasus kiai yang terkena permasalahan hukum di Madura baik Bupati kabupaten Bangkalan hingga Kabupaten Sumenep, ketua DPRD hingga mereka yang menduduki jabatan pimpinan di Madura. Hukum tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bukan hanya karena kedudukannya sebagai kiai kemudian menjadikannya dapat berbuat sesuai dengan keinginannya tetapi aturan yang ada tetap menyertai sesuai dengan konsekuensi sesuai dengan jabatan yang ia pegang.

Pergeseran peran kiai di Madura mulai dari orang yang disegani dalam hal agama yang banyak mengajarkan nilai-nilai agama dalam masyarakat kemudian dipercaya oleh partai politik untuk memberikan saran dan masukan untuk mendulang suara dalam partai politik dan kemudian para kiai tersebut menjajal masuk dalam tatanan kontestasi pemilu adalah tahapan yang terjadi dalam realitas social politik para kiai di Madura. Singkatnya, tahapan perubahan peran kiai dalam kontestasi pemilu dan relasi kekuasaan yang dibangun antara partai politik dan para kiai tak lepas dari adanya suatu usaha untuk mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan yang ada di suatu daerah dengan melibatkan kiai sebagai salah satu subjek untuk menarik perhatian dari masyarakat lokal Madura.

Kesimpulan

Dibagian kesimpulan ini hendak mengurai poin-poin penting tentang jawaban atas persoalan penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan diatas. Dalam kultur social masyarakat Madura kiai dianggap sebagai sosok yang memiliki peran yang sentral dalam menyebarkan nilai-nilai agama. Peribahasa Madura yang menggambarkan sosok kiai adalah *buppa'*, *babu'*, *guruh*, *ratoh* sehingga menempatkan posisi kiai berada diposisi kedua setelah orangtua dan menjadi penentu dalam mengambil keputusan-keputusan yang ada di dalam masyarakat.

Strata social kiai dalam hal ini menimbulkan konsekuensi sebagai seseorang yang paling dipercaya termasuk dalam urusan menentukan suara dalam kontestasi pemilu di tingkat lokal. Apa yang menurut kiai baik tentu baik juga bagi para santri, walisantri atau masyarakat di sekitarnya sehingga kemudian partai politik banyak sowan dan meminta restu kepada para kiai. Peran kiai dalam hal ini adalah sebagai jembatan bagi partai politik atau pasangan calon untuk mendulang sebanyak-banyaknya suara dengan menggunakan sisi agamis kiai tersebut.

Lambat laun peran kiai dalam kontestasi politik lokal tidak hanya sebagai penasehat dan pendukung dari partai politik namun faktanya banyak kemudian partai politik yang berlomba-lomba meminang para kiai untuk dijadikan sebagai pejabat public dengan beragam iming-iming dan dalam sebagai alat dari partai politik untuk mendongkrak suara dari

partai politik tersebut dengan menawarkan charisma kiai yang dibalut dengan nilai agamis. Peran kiai disinipun berubah tidak hanya sebagai sosok yang ahli dalam hal agama namun telah merambah kepada seorang yang menduduki jabatan structural pada suatu masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahmad Mukri Aji et al., 2020: 732 = Ahmad Mukri Aji, Harisah, & Syarifah Gustiawati Mukri. (2020). Position of Kiai in Traditions and Ideologies of Traditional Waqf in Maduranese Communities. *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29, No. 7s.
- Ali Machsan Moesa. *Kiai dan Politik, Dalam Wacana Civil Society*. Surabaya:LEPKISS, 1999.
- Andi S. Bupati Fuad Amin, Koruptor Rp.414 Miliar yang Bikin Geger LP. Retrieved December 16, 2019, from detik.com website <https://news.detik.com/berita/d-4127094/bupati-fuad-amin-koruptor-rp-414-miliar-yangbikin-geger-lp>
- “Dari Langit”: Kumpulan Esai tentang Manusia, Masyarakat, dan Kekuasaan”, <http://books.google.co.id/books?isbn=9799101425> (diakses pada 10 Desember 2022).
- Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta:LKiS, 2004.
- George Ritzer, Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2018
- Imam Suprayogo, *Kiai Politik, Kiai Advokatif dan Kiai Spiritual*. Surabaya: Universitas Airlangga, 1998.
- Imam Suprayogo, *Kiai dan Politik, Membaca Citra Politik Kiai*, UIN-Malang Press, Malang, 2007.
- Kuntowijoyo. *Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940*. Yogyakarta. Mata Bangsa.2002.
- Kaplan dan Manner, *Teori Budaya*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2000.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta:Metodologi Penelitian Kualitatif,1998.

- Nurul Azizah, *Artikulasi Politik Santri, Dari Kiai Menjadi Bupati*.
Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013.
- Wiyata, Latief. *Carok:Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*.
Yogyakarta: LKiS, 2002.